

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Hubungan Internasional

Hubungan internasional yang dapat di artikan sebagai adanya interaksi yang dilakukan oleh antar aktor yang tindakan dan pengaruhnya dapat menimbulkan dampak yang penting bagi aktor yang lain di luar yurisdiksi politik negara masing - masing, dalam konteks tersebut dapat digambarkan bahwa studi Hubungan Internasional terfokus pada peran Negara sebagai aktor Utama dan bagaimana cara dia dalam mempengaruhi aktor lain dalam pertarungan kekuasaan. Namun pada tahun 1990 pergeseran definisi Hubungan Internasional yang menyatakan bahwa HI merupakan suatu keputusan aktor yang berkaitan dengan tindakan aktor lain nya, Hubungan Internasional juga berkaitan dengan politik internasional yaitu berhubungan dengan hubungan politik antar negara dalam hal peperangan, diplomasi dan lain sebagainya. (Hadiwinata, 2017:12 -13)

Hubungan Internasional dalam keberadaannya saat ini menjadi ilmu yang mandiri, dengan kemandirian tersebut membuat ilmu Hubungan Internasional menjadi pendatang baru dalam serangkaian – serangkaian ilmu sosial lainnya, dalam upaya menampakkan kemandirian tersebut merupakan proses yang tidak sebentar. Sejarah perkembangannya mempunyai sifat interdisipliner, yang dimana Hubungan Internasional tidak dapat di pisahkan dari aspek ilmu – ilmu sosial yang lainnya sebagai pembentuk dengan sifat keilmuannya yang saling timbal balik.

Studi Hubungan Internasional yang memiliki sifat interdisipliner tersebut akan terlihat jelas apabila kita tidak mengabaikan masa lalu perkembangan studi Hubungan Internasional yang menjadi studi mandiri dan juga melihat bagaimana aliran – aliran pemikiran juga berkaitan pada proses perkembangan studi Ilmu Hubungan Internasional. (Darmayadi dkk, 2015:10-12)

Hubungan Internasional didefinisikan secara sempit sebagai Interaksi antar bangsa atau antar negara, yang berkenaan dengan interaksi negara – negara, dapat dimaknai dengan reaksi dan aksi yang terjadi di antara negara – negara yang berdaulat, yang biasanya diwakili oleh para elite yang memiliki kekuasaan di negara – negara tersebut. Hubungan internasional juga mencakup berbagai macam aktivitas yang berbeda yaitu Ekonomi, Sosial, Budaya, Hukum dan sebagainya. Aktivitas – aktivitas tersebut juga memiliki implikasi terhadap Hubungan Politik Internasional. Definisi lain juga menyatakan bahwa Hubungan Internasional dipahami studi masalah – masalah yang berkaitan dengan luar negeri dan juga isu – isu internasional yang terjadi di antara negara – negara, dan termasuk juga aktor non-negara yaitu Organisasi Internasional antar pemerintah maupun Organisasi Internasional non – pemerintah, serta Perusahaan Multinasional. (Bakry, 2017:3)

Hubungan Internasional merupakan Hubungan yang terjadi antara satu negara dengan negara lainnya. Dan pada hubungan ini yang menjadi pelaku utama atau Aktor adalah negara, Namun dalam perjalanannya dalam Interaksi antar negara ada Aktor lain yang bukan suatu negara. Hubungan internasional juga membahas kajian yang berkenaan dengan kondisi – kondisi politik, yang terjadi

pada masyarakat internasional yang berkaitan dengan Diplomasi, Hubungan antar negara – negara dan juga satuan politik lain nya. Dalam hubungan internasional untuk menentukan suatu strategi dalam berinteraksi dengan negara – negara lain maka di butuhkan nya Hukum Internasional yang di jadikan sebagai dasar. Dan untuk menentukan isu dan masalah dalam hubungan internasional maka di butuhkan Politik Internasional.(Munsaroh, 2019:1-3)

Menurut Nur Khasanah Hubungan Internasional di definisikan sebagai Suatu Interaksi dan kegiatan komunikasi yang dilakukan antara Negara – negara yang memiliki ikatan dan hubungan yang erat dari sesama negara. Interaksi tersebut dijadikan sebagai sarana untuk negara sebagai negara yang menyatakan diri untuk menyelenggarakan politik luar negeri negaranya. (Khasanah, 2019:2)

2.1.2. Organisasi Internasional

Organisasi Internasional menjadi salah satu aktor yang penting dalam Hubungan Internasional, selain sebuah negara. Maka dari itu kegiatan kerjasama internasional tidak lagi hanya dilakukan oleh antar negara saja akan tetapi juga Kerjasama antara Negara dengan Organisasi Internasional. Organisasi internasional didefinisikan sebagai pola kerjasama yang dilakukan dengan melintasi batas – batas negara yang di dasari juga dengan suatu struktur organisasi yang lengkap serta jelas ditujukan untuk berlangsung serta melakukan fungsi secara berkelanjutan dan melembaga untuk mengupayakan tercapainya tujuan – tujuan yang dibutuhkan serta di sepakati bersama – sama yang dilakukan antara pemerintah dengan pemerintah

ataupun antara kelompok non-pemerintah yang memiliki dasar negara yang berbeda. (Triwahyuni, 2015:80)

Organisasi Internasional didefinisikan sebagai asosiasi yang mempunyai permanen, memiliki anggota yang sekurang – kurangnya adalah tiga negara, memiliki suatu badan khusus yang diciptakan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Organisasi Internasional dibentuk berdasarkan perjanjian internasional yang telah memuat suatu tujuan dan kewenangan. (Ashari, 2015:254)

Organisasi Internasional yang pada umumnya diartikan sebagai suatu Organisasi yang pendiriannya melalui perjanjian atau pun instrument lainnya yang telah diatur dalam Hukum Internasional dan sudah memiliki personalitas Hukum Internasional sendiri.

Dalam Organisasi Internasional biasanya Anggota terdiri akan Negara – Negara, namun sering kali juga beberapa entitas mengajukan permohonan sebagai Anggota Organisasi. Organisasi internasional memiliki fungsi sebagai Lembaga perantara yang mengurus urusan - urusan antar negara, namun tidak bermaksud untuk menggantikan kekuasaan dan peranan negara – negara pada tingkat nasional ataupun internasional. Dengan arti lain, Bahwa Organisasi Internasional bukanlah Organisasi Supranasional yang memiliki kekuasaan di atas negara – negara.

(Bakry, 2017:172)

Menurut Graham Evans dan Jeffrey Newnham Organisasi Internasional sebagai berikut :

“Organisasi Internasional adalah struktur kelembagaan formal yang melampaui batas – batas nasional yang diciptakan melalui perjanjian multilateral antara negara-bangsa. Tujuan internasional adalah untuk

mendorong kerja sama internasional dalam bidang -bidang seperti Keamanan, Hukum, Ekonomi, Diplomasi dan Masalah Sosial.” (Bakry,2017:172)

Organisasi Internasional di definisikan sebagai suatu Organisasi yang bersifat antar pemerintah atau yang di sebut juga Organisasi Internasional Publik. Di dalam konvensi wina disebutkan bahwa yang disebut Organisasi Internasional merupakan Organisasi Antar pemerintah. Namun ada juga beberapa Organisasi Non pemerintah di beri fungsi tertentu oleh negara – negara. .(Munsaroh, 2019:29)

Organisasi Internasional memiliki karakteristik :

1. Pembuatan Organisasi Internasional biasanya di bentuk oleh Negara – Negara atau pihak - pihak yang berkuasa untuk mewakili suatu negara.
2. Pembentukan Organisasi Internasional dilakukan melalui Perjanjian.
3. Sebuah Organisasi Internasional, harus memiliki suatu Organ yang mempunyai kepentingan yang berbeda dari kepentingan negara – negara anggota nya. (Bakry, 2017:172)

Organisasi Internasional memiliki 8 kriteria :

1. Arah dan tujuan organisasi tersebut harus bersifat Internasional yang paling tidak dilakukan oleh Tiga Negara
2. Keanggotaan nya harus bersifat Individual atau partisipasi yang bersifat kolektif, dengan suara hak penuh. Yang sekurang – kurang nya terdapat tiga orang anggota dari negara yang berbeda.
3. Suatu Konstitusi Organisasi harus berisi struktur formal yang mengatur hak setiap anggota organisasi untuk memilih suatu badan pengatur dan sebagai petugas organisasi secara periodic.

4. Sebagai petugas Organisasi tidak berasal dari negara yang sama pada lebih dari satu periode tertentu dalam organisasi.
5. Harus memiliki kontribusi berupa dana yang berjumlah besar yang setidaknya dari tiga negara yang berbeda – beda dan tidak memiliki maksud mencari keuntungan dalam menyalurkannya kepada para anggota organisasi.
6. Setiap Organisasi harus memiliki hubungan yang berketergantungan dengan organisasi lainnya yang harus bisa berjalan secara mandiri dan memilih sendiri struktur organisasinya.
7. Harus adanya suatu bukti – bukti dalam kegiatan organisasi
8. Adanya beberapa kriteria negatif yaitu Politik, Ukuran, Ideologi, Wilayah suatu Aktifitas, alokasi geografis utama dan sebagainya. Tidak relevan untuk menentukan apakah suatu Organisasi merupakan Organisasi Internasional atau pun bukan.

2.1.3. Peran Organisasi Internasional

Berdirinya suatu Organisasi Internasional tentunya memiliki sebuah fungsi dan tujuan, yang dijadikan sebagai target, dan Organisasi tersebut juga memiliki peranan. Peranan dijadikan sebagai fungsi sebagai langkah untuk mengejar tujuan – tujuan suatu Organisasi.

Terdapat tujuan Organisasi Internasional dalam Hubungan negara dan masyarakat yang terdiri dari 3 kriteria yaitu :

1. Organisasi Internasional di jadikan sebagai legitimasi yang bersifat kolektif bagi kegiatan – kegiatan Organisasi atau kegiatan anggota secara personal.
2. Organisasi Internasional di jadikan sebagai penentuan suatu agenda internasional

Organisasi Internasional menjadi wadah bagi suatu anggota yang mempengaruhi kebijakan antara pemerintah sebagai cara kerja untuk memutuskan karakter atau struktur kewenangan secara global. (Fijriah, 2018:31)

Peranan Organisasi Internasional memiliki kesejajaran dengan negara, dapat melakukan berbagai sejumlah peranan yang penting kepada negara – negara anggota

1. Sebagai penyedia sarana dalam berbagai bidang bagi kegiatan kerjasama antar suatu negara, kerjasama yang dilakukan memberikan keuntungan bagi setiap anggota nya dan sebagai penyedia perangkat suatu administratif untuk menjelaskan suatu keputusan yang dibuat menjadi suatu tindakan.
2. Sebagai penyedia jalur komunikasi antara pemerintah dengan negara – negara anggota maka dapat di perluas dan dapat memudahkan akses ketika masalah terjadi dalam suatu negara. (Fijriah, 2018:32)

Peran suatu Organisasi Internasional yang sebagai aktor penting dalam Hubungan Internasional dan mengalami perkembangan yang pesat dan sejalan dengan penambahan jumlah Organisasi Internasional yang semakin banyak. (Ashari, 2015:254)

Peran – peran Organisasi Internasional antara lain sebagai :

1. Sebagai pusat kerjasama antar negara
 2. Sebagai aktor penting dalam Hubungan Internasional yang independen
 3. Membantu meningkatkan kebiasaan negara untuk bekerjasama
 4. Membantu menyelesaikan suatu permasalahan/perselisihan
- (Ashari,2015:255)

2.1.4. Organisasi Antar Pemerintah

Sebagai salah satu Aktor non-negara dalam Hubungan Internasional yang keberadaannya lebih dahulu sebagai ancaman bagi negara – negara yaitu Organisasi Antar pemerintah atau disebut *International Governmental Organization* (IGO). IGO di definisikan sebagai suatu Organisasi yang beranggotakan oleh negara – negara yang berdaulat atau juga Organisasi – Organisasi pemerintah lainnya. Istilah IGO tersebut mengacu kepada sebuah entitas yang dibentuk melalui perjanjian yang melibatkan dua negara atau lebih yang bekerja sama dalam itikad yang baik terhadap permasalahan – permasalahan yang menjadi suatu kepentingan bersama.

Organisasi antar pemerintah selalu dibentuk oleh pemerintah negara – negara yang ditunjuk untuk memperjuangkan kepentingan – kepentingan nasional antara masing – masing anggota organisasi melalui suatu kesepakatan multinasional. Dan juga untuk menghadapi halangan, ancaman dan isu – isu yang tidak dapat diselesaikan secara unilateral. Anggota Organisasi antar pemerintah pada umumnya bersifat secara sukarela karena tidak mengikat, sehingga

keberadaannya tidak mengancam dan tidak menghilangkan keberadaan suatu negara yang berdaulat. (Bakry, 2017:194)

Tujuan utama Organisasi antar pemerintah yaitu :

1. Terciptanya mekanisme bagi seluruh penduduk dunia untuk bekerja lebih baik lagi untuk kesuksesan bersama – sama di bidang perdamaian, keamanan, Ekonomi, Sosial.
2. Beberapa Organisasi antar pemerintah dikembangkan untuk memenuhi suatu kebutuhan pada sebuah forum netral

(Bakry, 2017:195)

2.1.5. Keamanan Internasional

Studi Keamanan Internasional dipisahkan melalui ranah keamanan tradisional berkaitan dengan keamanan militer, politik dan non-tradisional (non-militer). Keamanan Internasional yang bersifat non tradisional yaitu yang berkaitan dengan keamanan ekonomi, pangan, lingkungan hidup, energi, dan manusia. Keamanan Manusia sebagai salah satu fokus dalam keamanan internasional non-tradisional. (Sagena, 2013:74)

Dalam konsep Keamanan Internasional non-tradisional kemiskinan menjadi ancaman bagi manusia yang dimana dihadapkan dengan ancaman dan tekanan ketidakamanan ekonomi suatu masyarakat, individu yang menyebabkan tidak adanya kesejahteraan akan kehidupan yang layak yang disebabkan oleh kemiskinan tersebut ketidakamanan tersebut mengancam kehidupan masyarakat, kelompok, individu untuk hidup. Hal tersebut juga termasuk dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia. (Hidayat, 2017:110)

2.1.6. Sustainable Development

Konsep *Sustainable Development* merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk menciptakan kestabilan dalam pembangunan seperti pembangunan ekonomi, lingkungan, sosial, Pendidikan dan juga kesehatan. Konsep Pembangunan berkelanjutan tersebut bukan lah menjadi hal yang baru secara global ataupun nasional. Namun Isu Lingkungan Hidup menjadi salah satu kajian baru dalam studi Hubungan Internasional Kontemporer. Konsep pembangunan berkelanjutan menjadi perdebatan di karenakan memiliki nilai yang di anggap abstrak karena sulit untuk di mengerti dengan indikator yang terukur. Namun isu Lingkungan pertama kali menjadi agenda di dalam pertemuan internasional yang terjadi pada tahun 1972 di Stockholm.

Agenda tersebut berbicara tentang pentingnya pembangunan pada bidang Lingkungan sebagai salah satu faktor kesejahteraan manusia. Karena semakin lama dampak lingkungan hidup semakin mengganggu, yang sejalan dengan kemajuan teknologi. Istilah "*Sustainable Development* dicetuskan pada tahun 1987, oleh *World Commission on Environment and Development*". Dan dalam buku berjudul *Common future* dikemukakan 2 konsep yaitu Lingkungan dan Pembangunan. Pada laporan WCED *Sustainable Development* di definisikan suatu proses untuk menuju perubahan dengan cara eksploitasi sumber daya alam, tujuan investasi, orientasi pengembangan teknologi dan proses perubahan suatu institusi yang di dirikan agar serasi dan konsisten dengan keperluan masa yang akan datang atau pun masa sekarang. (Alisjahbana, 2018:1-3)

2.2. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini diperlukan nya kerangka pemikiran yang tujuannya agar dapat memprediksi sejauh mana penelitian bisa tergambar, terutama mengenai Variabel penelitian dengan implementasikan konsep yang sesuai dengan teori yang berkaitan dengan judul penelitian sehingga dengan itu di angkat menjadi masalah yang terdapat dalam penelitian. Kajian Ilmu Hubungan Internasional tersebut mempelajari tentang bagaimana peranan suatu Organisasi Internasional yang terdapat dalam negara anggota. Dan fenomena ini Hubungan Internasional yang berkaitan dengan adanya interaksi antara negara – negara untuk menjalin kepentingan di antara negara -negara tersebut. Kepentingan tersebut bisa mengenai Ekonomi, Sosial – Budaya, Keamanan dan juga Lingkungan Hidup. Dan dalam Hubungan Internasional bukan hanya negara sebagai Aktornya akan tetapi juga Organisasi Internasional. Organisasi Internasional sebagai salah satu Aktor penting dalam Hubungan Internasional. Salah satu contoh adalah PBB (Perserikatan Bangsa – Bangsa) yang dalam perjalanan Hubungan Internasional PBB telah melakukan berbagai resolusi untuk membangun perdamaian dan kesejahteraan di dunia.

PBB juga membentuk badan – badan yang bertujuan untuk membantu negara – negara dalam menyelesaikan permasalahan nya. Salah satunya adalah UNDP yang dibentuk sebagai Badan dari PBB untuk membantu pembangunan negara – negara khususnya juga bagi negara – negara berkembang dan negara – negara kurang berkembang. Karena memiliki banyak permasalahan dalam pembangunan negara terutama yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan dan masalah sosial lain nya seperti kemiskinan, kelaparan, Pendidikan yang kurang, Kesehatan dan lain sebagainya.

Maka dari itu PBB mengeluarkan program yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan dengan membuat suatu program yaitu Millenium Development Goals yang telah di sepakati pada tahun 2000 namun telah berakhir pada tahun 2015. *Millenium Development Goals* tersebut berisikan 8 tujuan, 21 sasaran dan 61 indikator.

MDGs sasaran nya hanya bertujuan untuk mengurangi sebagian dari setiap masalah pembangunan. Maka seteleh berakhirnya MDGs, MDGs di gantikan dengan SDGs, yang telah di sepakati oleh 193 negara pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa – Bangsa ke 70 yang terjadi pada bulan September 2015. yang berisikan 17 tujuan, 169 sasaran dan di berlakukan pada tahun 2016 hingga 2030.

Pada penelitian ini berfokus kepada Analisa terhadap Organisasi Internasional yang di bawah naungan Perserikatan Bangsa - Bangsa yaitu UNDP yang membahas tentang pembangunan negara khususnya pembangunan berkelanjutan yang telah memiliki program khusus yaitu *Sustainable Development Goals*, penelitian ini berfokus pada bidang Sosial yaitu terdapat pada poin pertama dalam SDGs yang berkenaan dengan pengentasan kemiskinan.

Karena terdapat 17 Tujuan *Sustainable Development Goals* yaitu Pengentasan kemiskinan, Mengakhiri kelaparan, Kesehatan dan Kesejahteraan, Kualitas Pendidikan yang baik, Kesetaraan Gender, Air bersih dan Sanitasi, Akses ke energi yang terjangkau, Pekerjaan layak dan pertumbuhan Ekonomi Infrastruktur, Industri dan Inovasi Mengurangi ketimpangan, Kota dan Komunitas yang berkelanjutan, Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, Penanganan Perubahan Iklim, Menjaga Ekosistem Laut, Menjaga ekosistem darat, Perdamaian, keadilan dan Kelembagaan yang kuat, Kemitraan untuk mencapai tujuan.

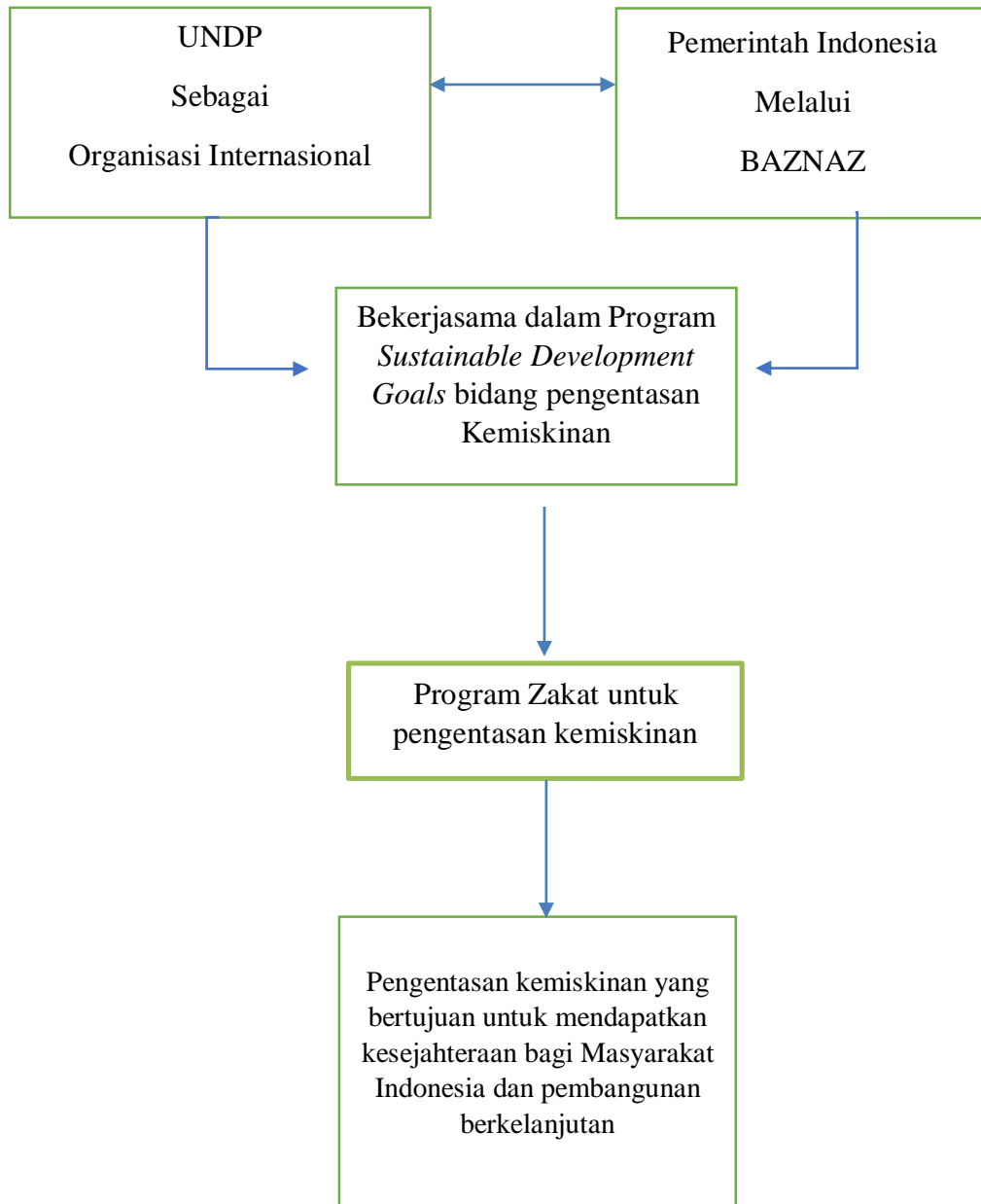
Penelitian ini meliputi teori yang berkaitan dengan Organisasi Internasional yang dapat membantu peneliti dalam menjelaskan peranan UNDP yang utamanya berkaitan dengan program yang dibuat untuk menanggapi permasalahan pembangunan negara dan permasalahan – permasalahan sosial. Serta juga menjelaskan secara singkat tentang kebijakan pemerintah Indonesia telah menunjukkan kesiapannya pada pelaksanaan SDGs, yang tertuang dalam Perpres No. 59 Tahun 2017.

Pemerintah Indonesia telah menerapkan Tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang akan dapat meningkatkan kesejahteraan

dalam sektor ekonomi masyarakat yang berkesinambungan, pembangunan tersebut akan menjaga berkelanjutan kehidupan sosial masyarakat Indonesia dan juga akan menjaga lingkungan hidup, menjamin juga keadilan dan tercapainya tata kelola yang bisa melindungi peningkatan kualitas hidup dan generasi ke generasi.

Dengan adanya program SDGs, UNDP dan Pemerintah Indonesia saling bekerja sama untuk mewujudkan pembangunan di negara Indonesia terutama berkaitan dengan bidang sosial pada poin pertama pengentasan kemiskinan yaitu program Zakat yang diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan melalui redistribusi kekayaan yang berdasarkan dengan keuangan islam yang telah dikembangkan di Indonesia, pada tahun 2017, dan Penelitian ini tidak berfokus pada satu lokasi khusus yang spesifik akan tetapi kota – kota yang berada di Indonesia meliputi Jambi, Lombok, Palu.

Berikut adalah gambaran singkat Kerangka Pemikiran



Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1